

BAB II

KONDISI KETIDAKSETARAAN GENDER DI MALAYSIA

Isu kesetaraan gender yang kini mulai mendapat perhatian masyarakat luas di Malaysia telah mengalami sejarah perjalanan yang panjang dengan melawan pemikiran patriarkis yang telah berakar di masyarakatnya. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan secara terperinci mengenai kondisi ketidaksetaraan gender dan perkembangan isu gender di Malaysia dengan melihat dan membandingkan partisipasi politik perempuan di era pemerintahan Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim untuk melihat pengaruh perbedaan tipe kepemimpinan kedua tokoh tersebut terhadap pertimbangan dan pengambilan keputusan kebijakan.

2.1 Ketidaksetaraan Gender di Tengah Masyarakat Malaysia

Salah satu isu gender yang menjadi sorotan utama bagi masyarakat Malaysia sendiri adalah tingginya angka pernikahan anak-anak atau pernikahan dibawah umur. Berdasarkan data UNICEF, terdapat 1.500 pernikahan anak-anak yang terdaftar di Malaysia, dengan beberapa negara bagian masih belum mempertimbangkan usia minimum 18 tahun sebagai batas untuk menikah (Bissex, 2022). Sehubungan dengan rekomendasi dari Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child), UNICEF menganjurkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun, baik dengan atau tanpa persetujuan orangtua dan tanpa pengecualian. Selain itu, dalam laporan advokasi UNICEF juga diuraikan bahwa pernikahan anak akan mempersingkat masa kanak-kanak, dimana mereka yang

menikah pada usia anak-anak seringkali putus sekolah sehingga harus menghadapi prospek ekonomi yang terbatas seumur hidup. Kehamilan dan persalinan dini juga memberikan resiko kesehatan yang serius, dan berpeluang tinggi terhadap timbulnya kasus kekerasan dalam rumah tangga serta eksploitasi seksual. Isu ini semakin relevan untuk disorot melihat dari 1.500 kasus pernikahan anak yang dilaporkan per tahun 2018, 90%-nya merupakan anak perempuan.

Menurut penelitian yang dilakukan Ipsos (2018), sebuah perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional, tiga masalah kesetaraan yang paling banyak terjadi di Malaysia antara lain, *sexual harassment*, *sexual violence*, dan *sexualisation of women in the media*. Selain isu-isu tersebut, masalah lain yang tidak kalah mendesak dan termasuk dalam 10 besar isu kesetaraan teratas di Malaysia antara lain: menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan, *gender stereotyping*, kekerasan di tempat kerja, kekerasan domestik, dukungan terhadap perempuan hamil/ibu baru, dan kurangnya perempuan dalam peran kepemimpinan. Survey yang dilakukan melibatkan 1.500 warga negara Malaysia dalam rentang usia 15-64 tahun. Lebih dari separuh masyarakat Malaysia (51%) meyakini bahwa pelecehan merupakan masalah nomor satu bagi perempuan di negaranya. Meskipun begitu, masih banyak orang yang meremehkan dan mengabaikan laporan pelecehan seksual. Banyak terjadi di beberapa kasus dimana tidak adanya tindakan nyata untuk menanggulangi dan memberikan konsekuensi yang efektif bagi pelaku, sehingga pelecehan seksual dalam berbagai bentuk masih kerap dialami oleh perempuan.

2.2 Rendahnya *Political Participation* Perempuan Malaysia

Partisipasi politik dapat dilihat melalui keterlibatan yang dimiliki seseorang dalam sektor politik dan tindakan yang dilakukan dalam upaya yang menentukan kebijakan politik atau sikap terhadap situasi politik yang sedang terjadi. Selain pada sektor pemerintahan, warga sipil juga dapat melakukan partisipasi politik dengan cara mematuhi kebijakan yang berlaku, menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, mengikuti pemilihan umum kepala daerah, melakukan diskusi politik, melakukan berbagai aksi politik seperti kampanye atau bergabung dengan organisasi politik (Putri & Gischa, 2021).

Pada praktiknya, partisipasi politik pada sektor pemerintahan masih lebih banyak didominasi oleh laki-laki dan membatasi kesempatan bagi perempuan. Hal ini berkaitan dengan budaya yang berlaku di masyarakat serta pemikiran masyarakat yang masih konservatif. Seperti negara-negara Asia lainnya, Malaysia memiliki sejarah dan akar budaya yang erat kaitannya dengan peran gender di masyarakat. Krisis politik yang terjadi pada 2020-2022 lalu juga mempengaruhi kondisi dan tingkat partisipasi politik perempuan di Malaysia. Krisis politik tersebut mengakibatkan perpecahan berbagai partai politik, khususnya Pakatan Harapan, serta perubahan pemerintahan di negara-negara bagian seperti Johor, Melaka, Kedah, Perak, dan Sabah. Krisis politik ini terjadi setelah pengunduran diri Mahathir Mohammad dari jabatan Perdana Menteri Malaysia pada 24 Februari 2020 lalu (acehtrend.com, 2020). Pada masa krisis

politik ini juga terjadi berbagai perubahan dalam pemerintahan seperti, pergantian perdana menteri dari Mahathir

Mohammad menjadi Muhyiddin Yassin, hingga kemudian digantikan lagi oleh Ismail Sabri Yakoob; aksi protes dan demonstrasi dari publik terhadap kinerja dan sistem pemerintah; penanganan yang buruk terhadap pandemi Covid-19.

Banyak dari partai-partai politik di Malaysia seperti Partai Islam Malaysia (PAS) yang berorientasi pada islam, sehingga perempuan cenderung sulit untuk aktif dalam politik (Purwaningsih, 2008). Di sisi lain, terdapat pula partai-partai yang memberikan porsi yang cukup banyak bagi perempuan, seperti UMNO yang memiliki hampir 50% kader perempuan dan Partai Keadilan yang didirikan Wan Azizah yang membawa gerakan baru untuk reformasi serta kepentingan kelompok minoritas seperti etnis dan perempuan. Terlepas dari besarnya jumlah perempuan yang menduduki kursi politik, banyaknya partai yang masih memegang erat unsur-unsur islami dan memisahkan bagian perempuan dengan laki-laki membuat peluang partisipasi perempuan dalam ranah politik masih belum terbuka lebar. Selain itu, krisis politik yang terjadi juga turut andil dalam mempengaruhi kepercayaan masyarakat, termasuk perempuan, dalam hal politik yang pada akhirnya mempengaruhi keterlibatan mereka.

2.3 *Gender Inequalities* di Era Mahathir Mohammad

Mahathir Mohammad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya pada tahun 2018 dengan memimpin partai koalisi Pakatan Harapan (PH). Pada masa pemerintahannya yang kedua ini, Mahathir

menghadapi berbagai tantangan terkait banyaknya pergantian yang terjadi akibat perubahan zaman. Selain itu, ia juga terikat dengan janji-janji kampanye politik Pakatan Harapan dan untuk melakukan perubahan, dibanding pemerintahan saat beliau menjabat sebelumnya, seiring dengan perubahan zaman (Bonasir, 2018). Adapun tantangan pemerintahan yang dihadapi Mahathir antara lain: terjadinya perubahan pemerintahan sehingga harus memastikan kelancaran proses undang-undang dan urusan harian yang berkaitan dengan demokrasi sekaligus menghadapi birokrasi dan institusi kerajaan yang selama ini menggunakan satu sistem pemerintahan dibawah Barisan Nasional; mewujudkan janji kampanye untuk menghapuskan pajak barang dan jasa (GST) dalam tempo 100 hari pertama pemerintahan sebagai tanggapan atas keluhan rakyat Malaysia terkait peningkatan biaya hidup akibat diberlakukannya pajak barang dan jasa sebesar 6% pada 1 April 2015; mewujudkan janji kenaikan upah minimum dari 1.000 ringgit menjadi 1.500 ringgit.

Pada masa pemerintahannya, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama Mahathir, salah satunya adalah pemberantasan skandal korupsi dan reformasi yang disampaikan dalam Tinjauan Paruh Waktu terhadap 11th Malaysia Plan yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan produktivitas (Natalia, 2018). Selain itu, Mahathir juga fokus mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan penanganan masalah lingkungan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas bawah. Segera setelah mengalami kemenangan dalam pemilu 2018, Mahathir segera melakukan tindakan keras untuk

menyelidiki skandal 1MDB yang melibatkan korupsi besar-besaran yang bernilai miliaran dolar (Reuters, 2022). Ia juga bekerja sama dengan pihak berwenang dari Amerika Serikat dan Singapura untuk mengurus pengembalian dana yang telah disalahgunakan. Dengan bergabung dan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim, Mahathir kembali dari masa pensiunnya untuk melengserkan pemerintahan koalisi Barisan Nasional.

Sebagai seorang politisi senior yang sudah lama aktif di politik pemerintahan Malaysia, Mahathir Mohammad cenderung menganut nilai-nilai Asia dalam pandangannya terhadap suatu isu dan kebijakan. Dalam wawancara yang diterbitkan Airlangga University Press (2020), yang bekerjasama dengan pihak Universiti Utara Malaysia, Mahathir menyampaikan bahwa hak kebebasan individu juga bergantung terhadap hak kelompok. Apabila seorang individu melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan dalih hak kebebasan individu, maka ia telah melanggar hak kelompok. Beliau juga menyampaikan bahwa Malaysia bukanlah demokrasi liberal. Malaysia memiliki masyarakat multi-agama, sehingga nilai-nilai moral sangat penting dan tidak bisa mengikuti liberalisme yang berasal dari Barat (Sani et al., 2020, 47-48).

Dalam peningkatan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di masyarakat sosial, pemerintah telah membuat kemajuan dengan mempromosikan pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Akan tetapi, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengatasi stereotip budaya yang sudah sangat melekat di masyarakat Malaysia (Baqutayan, 2020). Pada perayaan Malaysia's Women Day 2002, Mahathir menyampaikan

sebuah pidato yang menekankan peran perempuan sebagai ibu dan menyebutkan bahwa pengasuhan anak merupakan tugas seorang ibu dan bukan merupakan tanggungjawab yang dibagi untuk kedua orangtua (dapmalaysia.org, 2002). Hal ini kemudian dianggap sebagai stereotip gender yang membatasi peran perempuan diluar rumah sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih bersifat eksklusif. Di depan 15.000 perempuan yang berkumpul di Bukit Jalil untuk perayaan “Hari Wanita 2002”, Mahathir justru menekankan pidatonya untuk membahas isu jumlah mahasiswa yang jumlahnya lebih sedikit dari mahasiswi bahkan ‘memperingatkan’ para laki-laki bahwa apabila hal ini terus berlanjut, maka masa depan negara akan dipimpin dan diatur oleh perempuan.

2.3.1 *Political Participation* Perempuan Malaysia di Era Mahathir Mohammad

Partisipasi perempuan dalam politik pemerintahan pada masa pemerintahan Mahathir Mohammad telah mengalami peningkatan meskipun masih tergolong sedikit dan belum memenuhi target 30% yang telah ditetapkan pemerintah Malaysia pada tahun 2004 (Sani et al., 2020, 51). Mahathir sendiri berpendapat bahwa untuk mendapatkan posisi di pemerintahan, perempuan harus sangat agresif dan memenangkan popularitas. Banyak dari perempuan yang berhenti dari pekerjaannya setelah mereka menikah atau memiliki anak, sedangkan laki-laki tidak, sehingga mereka memiliki lebih banyak peluang.

Rank	Country	Score	Rank change	Score change	
		0-1	2018	2018	2006
78	Czech Republic	0.706	4	+0.014	+0.035
79	Mongolia	0.706	-21	-0.007	+0.024
80	El Salvador	0.706	7	+0.016	+0.022
81	Russian Federation	0.706	-6	+0.004	+0.029
82	Ethiopia	0.705	35	+0.049	+0.111
83	Eswatini	0.703	-3	+0.009	+0.043
84	Greece	0.701	-6	+0.004	+0.047
85	Indonesia	0.700	-	+0.010	+0.046
86	Dominican Republic	0.700	-12	-0.001	+0.036
87	Viet Nam	0.700	-10	+0.001	n/a
88	Lesotho	0.695	-7	+0.001	+0.014
89	Cambodia	0.694	4	+0.011	+0.065
90	Malta	0.693	1	+0.008	+0.042
91	Cyprus	0.692	1	+0.008	+0.049
92	Brazil	0.691	3	+0.010	+0.037
93	Kyrgyz Republic	0.689	-7	-0.002	+0.014
94	Azerbaijan	0.687	3	+0.007	n/a
95	Brunei Darussalam	0.686	-5	+0.001	n/a
96	Cameroon	0.686	-39	-0.028	+0.099
97	Liberia	0.685	-1	+0.004	n/a
98	Armenia	0.684	-	+0.006	n/a
99	Senegal	0.684	-5	+0.002	n/a
100	Paraguay	0.683	4	+0.011	+0.028
101	Nepal	0.680	4	+0.009	+0.132
102	Sri Lanka	0.680	-2	+0.004	-0.040
103	Fiji	0.678	3	+0.008	n/a
104	Malaysia	0.677	-3	+0.002	+0.027
105	Hungary	0.677	-3	+0.003	+0.007

Gambar 2. 1 Global Gender Gap Index Rankings

Sumber: Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum

Berdasarkan Global Gender Gap Report tahun 2020, Malaysia menempati urutan ke 104 dari total 153 negara yang terdata oleh World Economic Forum. Hal ini menunjukkan tingkat *gender gap* Malaysia pada masa pemerintahan Mahathir masih sangat rendah dengan angka skor 0.677. Selain itu, meskipun nilai tersebut bertambah sedikit dari survei sebelumnya di tahun 2018, Malaysia terlihat mengalami penurunan sebesar 3 peringkat.

Political Empowerment					
Rank	Country	Score (0-1)	Rank	Country	Score (0-1)
1	Iceland	0.701	78	Malta	0.184
2	Norway	0.598	79	Korea	0.179
3	Nicaragua	0.565	80	Zambia*	0.174
4	Rwanda	0.563	81	Belarus	0.172
5	Finland	0.563	82	Indonesia	0.172
6	Costa Rica	0.545	83	Ukraine	0.171
7	Bangladesh	0.545	84	Mali	0.171
8	Spain	0.527	85	Kenya	0.169
9	Sweden	0.525	86	United States	0.164
10	South Africa	0.497	87	Greece	0.164
11	Ireland	0.493	88	Dominican Republic	0.163
12	Germany	0.477	89	Cape Verde	0.163
13	New Zealand	0.474	90	Malawi	0.162
14	Mexico	0.468	91	Montenegro	0.161
15	France	0.459	92	Singapore	0.159
16	Ethiopia	0.427	93	Pakistan	0.159
17	Denmark	0.421	94	Georgia	0.154
18	India	0.411	95	China	0.154
19	Switzerland	0.407	96	Madagascar	0.151
20	United Kingdom	0.395	97	Fiji	0.150
21	Cuba	0.392	98	Lao PDR	0.150
22	Argentina	0.387	99	Algeria	0.145
23	Albania	0.376	100	Chad	0.141
24	Namibia	0.369	101	Swaziland	0.138
25	Canada	0.365	102	Lesotho	0.137
26	Mozambique	0.362	103	Egypt	0.133
27	Bolivia	0.357	104	Brazil	0.133
28	Latvia	0.355	105	Kyrgyz Republic	0.130
29	Philippines	0.353	106	Kazakhstan	0.130
30	Austria	0.344	107	Ghana	0.129
31	Trinidad and Tobago*	0.329	108	Guinea	0.125
32	Senegal	0.320	109	Turkey	0.124
33	Colombia	0.318	110	Vietnam	0.123
34	Belgium	0.313	111	Cyprus	0.122
35	Uganda	0.309	112	Paraguay	0.122
36	Chile	0.307	113	Jordan	0.121
37	Estonia	0.294	114	Armenia	0.118
38	Bosnia Herzegovina	0.290	115	Maldives	0.111
39	Portugal	0.278	116	Togo	0.111
40	Netherlands	0.276	117	Malaysia	0.108

Gambar 2. 2 The Global Gender Gap Index Rankings oleh Subindex Tahun 2020
 Sumber: Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum

Pada poin pemberdayaan politik, Malaysia menempati peringkat 117 dari total 152 negara. Dengan angka skor hanya sebesar 0.108, Malaysia juga masih berada di tingkatan yang rendah, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina yang menempati peringkat 29 dan Timor-Leste di peringkat 51. Sehingga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peningkatan angka atau jumlah tidak menjadikan tingkat

kesetaraan gender menjadi tinggi karena harus dilihat melalui nilai dan persentase keseluruhan.

2.4 *Gender Inequalities* Era Anwar Ibrahim

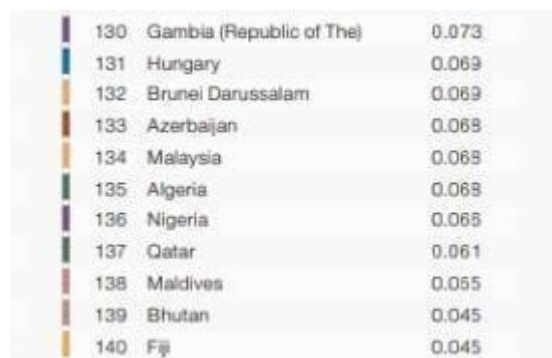
Setelah menjadi Perdana Menteri Malaysia pada November 2022 lalu, Anwar Ibrahim menghadapi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terkait reformasi hak-hak manusia dan sipil. Malaysia sendiri telah bergabung dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-hak Anak (CRC) sejak tahun 1995 (Lemière, 2023). Akan tetapi, pemerintah belum memulai revolusi demokratis seperti yang telah dijanjikan dan hak-hak perempuan dan anak-anak hanya ditangani secara sporadis. Secara umum, masih banyak terjadi ketidakadilan sosial bagi perempuan dan anak-anak di Malaysia. Para perempuan yang melaporkan pelecehan masih menerima gangguan dan stigma dari masyarakat, media, dan institusi, sementara sistem hukum yang ada belum bisa mengatasi hal tersebut.

Kasus kekerasan seksual dan perampokan di sekolah masih terus berlanjut hingga saat ini, termasuk pemeriksaan menstruasi oleh guru di sekolah yang terungkap pada 2021 lalu. Pendidikan seks masih sulit dijangkau dan akses terhadap konseling reproduksi masih terbatas. Sementara, kasus kehamilan remaja, *incest*, kekerasan seksual, dan penyakit menular seksual tetap tinggi. Delapan dari sembilan isu hak-hak anak yang diangkat oleh Komisi Hak-hak Manusia Malaysia (SUHAKAM) pada tahun 2004 belum diatasi, bahkan setelah 20 tahun berlalu, termasuk pada perlindungan anak-anak yang marjinal, seperti mereka yang hidup dengan menderita HIV/AIDS, masyarakat berpendapatan

rendah, orang dengan disabilitas, imigran tanpa dokumen, dan anak-anak yatim piatu.

2.4.1 *Political Participation* Perempuan Malaysia di Era Anwar Ibrahim

Pemerintahan baru yang dipimpin Anwar Ibrahim belum berhasil menerapkan kuota partisipasi politik perempuan minimal 30% yang direkomendasikan oleh CEDAW (Lemière, 2023). Per April 2023, perwakilan perempuan dalam politik tetap terbatas dan hanya 30 dari 222 anggota parlemen yang merupakan perempuan (13,6%). Kabinet pemerintahan sendiri hanya memiliki 5 perempuan untuk 22 orang laki-laki, atau hanya 18% dari menteri-menteri. Dengan kurangnya perwakilan perempuan, harapan untuk kebijakan yang lebih inklusif menjadi terancam.



Gambar 2. 3 The Global Gender Gap Index Tahun 2024, hasil dari Subindex

Sumber: Global Gender Gap Report 2024, World Economic Forum

Seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas, tingkat pemberdayaan politik bagi perempuan di Malaysia mengalami penurunan dari angka 0.108 di tahun 2020 menjadi 0.068 di tahun 2024. Peringkat Malaysia juga mengalami penurunan ke angka 134 dari total

146 negara. Dengan begitu, Malaysia juga menjadi negara dengan tingkat pemberdayaan politik paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Terlepas dari lambatnya peningkatan kesetaraan gender di Malaysia, beberapa tokoh perempuan sudah menunjukkan peranan penting dalam politik pemerintahan. Istri dari Anwar Ibrahim, Wan Azizah Wan Ismail, mulai aktif di dunia politik sejak suaminya dipenjarakan dengan tuduhan korupsi dan sodomi pada tahun 1999 (Suastha, 2018). Wan Azizah mulai membentuk gerakan pro-demokrasi dan memimpin organisasi non-profit Gerakan Keadilan Sosial (ADIL) sebelum membantu suaminya mendirikan Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Pada 2018, Wan Azizah dipercaya oleh Mahathir Mohammad sebagai Wakil Perdana Menteri yang menjadikannya sebagai perempuan Malaysia pertama yang diangkat menjadi wakil perdana menteri. Selain itu, Anwar Ibrahim juga mengangkat lima orang perempuan lainnya sebagai menteri, yang menjadikan pemerintahannya memiliki jumlah menteri perempuan terbanyak dibandingkan sebelumnya (Azizah, 2023). Adapun kelima menteri perempuan tersebut yaitu: Nancy Shukri, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat; Yeoh Tseow Suan, Menteri Pemuda dan Olahraga; Fadlina Binti Sidek, Menteri Pendidikan; Zaliha Binti Mustafa, Menteri Kesehatan; Azalina Binti Othman, Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi.

2.4.2 Pengaruh Transisi Pemerintahan Anwar Ibrahim

Setelah menduduki jabatan sebagai perdana menteri, Anwar Ibrahim menghadapi berbagai tantangan seperti, hambatan struktural terhadap reformasi, kurangnya strategi yang kohesif diantara para mitra koalisi, dan pendekatan hati-hati para anggota parlemen yang dipengaruhi pertimbangan elektoral (Weiss, 2024). Anwar Ibrahim memimpin dengan mendorong adanya reformasi pemerintahan. Akan tetapi, melihat kemajuan yang terbatas, muncul kekhawatiran terhadap komitmen pemerintah akan reformasi yang signifikan dan nasib Malaysia di masa mendatang.

Beberapa tantangan utama yang menghambat usulan reformasi dalam pemerintahan Anwar Ibrahim yaitu: standar tinggi untuk amandemen konstitusi, dimana reformasi memerlukan mayoritas dua pertiga untuk melakukan amandemen konstitusi; ketakutan akan reaksi politik (*political backlash*), yaitu adanya kecemasan terhadap potensi dampak politik apabila para reformis mendorong terlalu jauh atau terlalu cepat; kurangnya komitmen dari kepemimpinan, dimana tidak adanya antusiasme dari para pemimpin puncak untuk mengejar reformasi substansial yang mempengaruhi keseluruhan momentum; agenda politik yang terfragmentasi, dimana tidak adanya *platform* bersama yang jelas dan terartikulasi di antara mitra koalisi menyebabkan ketidakpastian prioritas dan akuntabilitas; perang wilayah dan persaingan fraksional,

yaitu adanya konflik internal dan tanggung jawab yang tumpang tindih di antara kementerian mempersulit kemajuan reformasi.

Faktor-faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan berkontribusi terhadap lambatnya kemajuan reformasi pada pemerintahan Anwar Ibrahim. Untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, ia perlu membuat kompromi politik, terutama dengan menggabungkan koalisinya sendiri, yang didukung oleh para pemilih yang lebih muda dan memiliki pemikiran yang sejalan dengan reformasi serta pemilih non-melayu, dengan sisa-sisa Barisan Nasional (BN) agar memiliki suara yang cukup untuk membentuk mayoritas di parlemen (Maizland, 2024).

Pemerintahan Anwar Ibrahim memiliki pengaruh yang cukup besar bagi Malaysia. Salah satunya adalah stabilitas yang memungkinkan pemerintah untuk fokus kepada kebijakan ekonomi yang lebih stabil (EAF Editors, 2024). Meskipun reformasi ekonomi masih terbilang lambat, stabilitas yang ada membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah Malaysia juga mengalami keterbatasan fiskal yang signifikan, dimana pendapatan pajak hanya sekitar 12% dari GDP dan masih jauh dibawah standar bagi negara dengan tingkat pengembangan seperti Malaysia. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Malaysia diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 4,3% pada tahun 2024 menurut Bank Dunia.

Sejak menjabat sebagai perdana menteri, Anwar telah memperluas dukungan parlemen, yang tetap memenuhi hukum dua pertiga kursi parlemen yang diperlukan untuk mengubah konstitusi Malaysia. Selain itu, partisipasi keterlibatan masyarakat dalam proses politik mengalami peningkatan, meskipun masih ada tantangan untuk mencapai posisi strategis dan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa reformasi yang lebih mendalam dapat terwujud.